

PENYULUHAN SISTEM AGRIBISNIS SUATU PENDEKATAN HOLISTIK

NYOMAN SUPARTA

PS. Sosek dan Agribisnis, Fakultas Peternakan Universitas Udayana

ABSTRACT

The rising issues nowadays related to the existence of chicken broiler business and agribusiness system are low added value obtained for farmers, disharmonic relationship among agribusiness system agents, and low competitive ability. On the other hand, the business and agribusiness system improvement need dynamic, creative and innovative human recourses with strong business instinct, and the ability in understanding the ethics of agribusiness system relationship well for achieving better business results. The reason of this gap might be caused by the fact that the farmers or other agribusiness sub-system agents do not fully understand the business and agribusiness system. The research has been carrying out to obtain depiction of agribusiness behavior with industrial culture, and its extension approach. The result of the research shows that application of the holistic extension of agribusiness was needed. The extension's objective exactly to the change of agribusiness behavior with industrial culture. The extension materials include all of production technical aspect, agribusiness management aspect, and agribusiness system relationship management aspect with industrial's perception, so the agribusiness system businessmen's could have the same perception and attitude about: vision, missions, business ethics, objective, goal and cooperative plan witch formulated with open way. The extension methods must be more varieties. The extension agribusiness system needs professionalism extensionists too, but usually base on the basic philosophy and principles of the extension.

Key words: Agribusiness Behavior, Eextension of Agribusiness System, Holistic

ENDAHULUAN

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan upaya sadar yang sengaja direncanakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki, dengan menggunakan inovasi dan teknologi tertentu yang sesuai dengan potensi agroekosistem setempat agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani. Pembangunan pertanian telah berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Salah satu prestasi terbaiknya adalah dibidang tanaman pangan khususnya padi, yang telah mampu mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara swasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan tersebut didukung oleh penyuluhan pertanian dengan pendekatan sistem BIMAS (sejak 1963/1964), sistem LAKU (1976) sistem INSUS (1979) dan sistem SUPRA INSUS (1986), melalui inovasi teknologi Sapta Usaha Pertanian secara lengkap (Abbas, 1995), serta telah dibangunnya prasarana transportasi, tersedianya sarana produksi, kemajuan teknologi, berkembangnya pasar hasil usahatani, serta adanya insentif bagi usaha tani, yang disebut lima faktor pokok pembangunan pertanian oleh Mosher (1966).

Berbagai pendekatan penyuluhan tersebut telah mengubah profil petani Indonesia, yakni lebih meningkat tingkat pendidikannya, lebih mengenal kemajuan, kebutuhan dan harapan-harapannya juga lebih baik, dan telah mampu berkomunikasi secara impersonal.

Jarmie (1995) menandakan bahwa perilaku petani telah berubah menjadi petani komersial, yakni petani yang merencanakan usahatani dan berani mengambil risiko dalam menerima dan menetapkan ide baru perbaikan usahatani dengan berorientasi kepada kebutuhan pasar.

Namun demikian, perubahan perilaku yang positif itu belum diikuti oleh perubahan sikap rasional sebagai pengusaha usahatani yang mandiri dan tangguh. Kesejahteraan petani juga belum banyak meningkat, padahal salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan karena paradigma petani yang memandang bahwa usahatani adalah usaha produksi, yakni petani berfungsi hanya untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. Pasar, pemasaran, dan pengolahan hasil pertanian berada di luar jangkauan perhatian bisnisnya. Kondisi seperti itu, secara tidak disadari telah diciptakan oleh sistem dan program pembangunan pertanian pada waktu itu. Perencanaan penyuluhan yang *top down* telah mengubah penyuluh menjadi corong pemerintah, sehingga petani hanya menjadi obyek yang harus mengikuti kemauan penyuluh. Akibatnya, sangat kecil peluang petani untuk berkreaitivitas dan berinisiatif dalam mengambil keputusan, seharusnya petani dan usahatanyalah yang menjadi sentral dalam pembangunan pertanian.

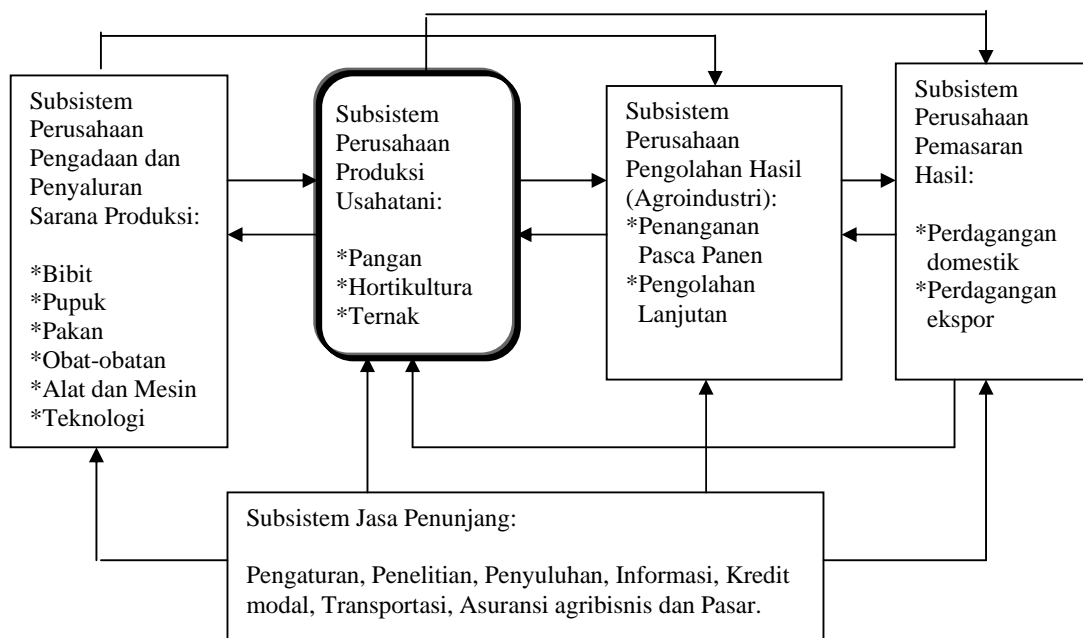
Konsep perusahaan dan sistem agribisnis dimunculkan untuk mengubah paradigma petani bahwa petani bukanlah hanya sebagai pekerja tani atau pengusaha usahatani, tetapi pengelola atau “manajer perusahaan agribisnis,” yang berkedudukan setara dengan perusahaan agribisnis lainnya yang berada di subsistem agribisnis hulu maupun di subsistem agribisnis hilir. Petani seharusnya senantiasa berorientasi kepada kebutuhan pasar, bersama-sama perusahaan agribisnis lainnya bersinergi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kebersamaan dan saling ketergantungan antar perusahaan agribisnis dalam menghasilkan produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar itulah disebut dengan “sistem agribisnis.” Apabila kondisi seperti itu benar-benar berhasil diciptakan oleh mereka, maka otomatis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani akan terwujud. Untuk mewujudkan perilaku agribisnis itulah diperlukan “penyuluhan sistem agribisnis,” yang berbeda dengan penyuluhan sistem Bimas atau LAKU dan semacamnya.

KONSEP PERUSAHAAN DAN SISTEM AGRIBISNIS

Penggunaan istilah agribisnis di Indonesia baru berkembang di kalangan akademisi sejak tahun 1980-an, sedangkan pengembangannya dalam kerangka sebagai pendekatan pembangunan pertanian di Indonesia baru dimulai pada 1994 yakni akhir Pelita V (PJP I) yang selanjutnya diteruskan pada PJP II. Menurut Downey dan Ericson (1992), Agribisnis meliputi keseluruhan kegiatan manajemen bisnis mulai dari perusahaan yang menghasilkan

sarana produksi untuk usahatani, proses produksi pertanian, serta perusahaan yang menangani pengolahan, pengangkutan, penyebaran, penjualan secara borongan maupun penjualan eceran produk kepada konsumen akhir.

Batasan tersebut menggambarkan bahwa agribisnis merupakan suatu sistem. Konsep agribisnis sebagai sistem, merupakan suatu “entitas” (Amirin, 1996), yang tersusun dari sekumpulan subsistem yang bergerak secara bersama-sama dan saling tergantung untuk mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pengertian tersebut, Departemen Pertanian (2001) mengedepankan konsep “perusahaan dan sistem agribisnis”, yakni subsistem agribisnis hulu (perusahaan pengadaan dan penyaluran sarana produksi), subsistem agribisnis tengah (perusahaan usahatani), subsistem agribisnis hilir (perusahaan pengolahan hasil atau agroindustri dan perusahaan pemasaran hasil, serta subsistem jasa penunjang (lembaga keuangan, transportasi, penyuluhan dan pelayanan informasi agribisnis, penelitian kaji terap, kebijakan pemerintah, dan asuransi agribisnis) perusahaan atau lembaga bisnis. Masing-masing perusahaan tersebut merupakan “perusahaan agribisnis” yang harus dapat bekerja secara efisien, selanjutnya semua perusahaan agribisnis tersebut harus melakukan hubungan kebersamaan dan saling ketergantungan dalam suatu sistem untuk lebih meningkatkan efisiensi usaha dan mencapai tujuan agribisnis (Gambar 1).



Gambar 1. Konsep Perusahaan dan Sistem agribisnis

FUNGSI SUBSISTEM AGRIBISNIS DALAM SISTEM AGRIBISNIS

Masing-masing komponen pelaku perusahaan agribisnis biasanya membagi diri dalam fungsi dan peran atau tugasnya, namun tetap bersinergi untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Integrasi vertikal antar perusahaan agribisnis yang berbeda pemilikannya sering diwujudkan dalam bentuk “kemitraan usaha” atau jika pemilikannya sama disebut “perusahaan terintegrasi”.

Subsistem perusahaan agribisnis hulu berfungsi menghasilkan dan menyediakan sarana produksi pertanian terbaik agar mampu menghasilkan produk usahatani yang berkualitas. Dalam hubungan kemitraan inti plasma, maka perusahaan agribisnis hulu dapat melakukan perannya, antara lain: memberikan pelayanan yang bermutu kepada usahatani, memberikan bimbingan teknis produksi, memberikan bimbingan manajemen dan hubungan sistem agribisnis, memfasilitasi proses pembelajaran atau pelatihan bagi petani, menyaring dan mensintesis informasi agribisnis praktis untuk petani, mengembangkan kerjasama bisnis (kemitraan) untuk dapat memberikan keuntungan bagi para pihak.

Subsistem perusahaan usahatani sebagai produsen pertanian berfungsi melakukan kegiatan teknis produksi agar produknya dapat dipertanggung jawabkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Mampu melakukan manajemen agribisnis secara baik agar proses produksinya menjadi efisien sehingga mampu bersaing di pasar. Karena itu, petani umumnya memerlukan penyuluhan dan informasi agribisnis, teknologi dan inovasi lainnya dalam proses produksi, bimbingan teknis atau pendampingan agar petani dapat melakukan proses produksi secara efisien dan bernilai tambah lebih tinggi. Dalam hubungan kemitraan inti plasma, petani berperan sebagai plasma.

Subsistem perusahaan agribisnis hilir berfungsi melakukan pengolahan lanjut (baik tingkat primer, sekunder maupun tersier) untuk mengurangi susut nilai atau meningkatkan mutu produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, serta berfungsi memperlancar pemasaran hasil melalui perencanaan sistem pemasaran yang baik. Dalam hubungan kemitraan inti plasma, maka perusahaan agribisnis hilir itu sering berfungsi sebagai inti yang mempunyai kewajiban untuk mendorong berkembangnya usahatani.

Subsistem jasa penunjang (penyuluhan, penelitian, informasi agribisnis, pengaturan, kredit modal, transportasi, dll) secara aktif ataupun pasif berfungsi menyediakan layanan bagi kebutuhan pelaku sistem agribisnis untuk memperlancar aktivitas perusahaan dan sistem agribisnis. Masing-masing komponen jasa penunjang itu mempunyai karakteristik fungsi yang berbeda, namun intinya adalah agar mereka dapat berbuat sesuatu untuk mengurangi beban dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan sistem agribisnis.

PERILAKU AGRIBISNIS

Perilaku merupakan cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis (Kast dan Rosensweig, 1995), refleksi dari hasil sejumlah pengalaman belajar seseorang terhadap lingkungannya yang dapat dilihat dari aspek pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), keterampilan (*psychomotoric*), dan tindakan nyata (*action*) (Rogers, 1969).

Menurut Suparta, (2001) perilaku agribisnis dapat diukur dari: (1) aspek perilaku teknis produksi, yakni: unsur panca usaha peternakan; (2) aspek perilaku manajemen agribisnis, yakni: perencanaan agribisnis, pemanfaatan sumber daya agribisnis, meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, senantiasa memperbaiki mutu hasil, melakukan perekayasaaan teknis produksi, melakukan fungsi kelembagaan agribisnis, dan selalu mengutamakan ketepatan dan kecepatan pelayanan; dan (3) aspek perilaku hubungan sistem agribisnis, yakni: melakukan hubungan kebersamaan dan saling ketergantungan dengan perusahaan agribisnis lainnya, melakukan kerjasama secara harmonis, dan aktif melakukan komunikasi informasi agribisnis.

Suatu hasil penelitian pada perusahaan agribisnis ayam ras pedaging yang dilakukan di propinsi Jawa Timur dan Bali oleh Nyoman Suparta (2002) menunjukkan bahwa sebagian besar (74,89%) peternak termasuk katagori perilaku agribisnis tinggi, namun demikian salah satu pendukung perilaku agribisnis yakni aspek perilaku hubungan sistem agribisnisnya termasuk katagori rendah sampai sedang (Tabel 1). Keadaan ini disebabkan karena penyuluh atau sumber informasi dan peternak selama ini masih saja berorientasi kepada produksi dan produktivitas. Hal ini terbukti dari sebagian besar (69,12 %) peternak menyatakan menerima materi penyuluhan tentang teknis produksi; 34,93 % tentang manajemen agribisnis; dan hanya 6,12 % tentang sistem agribisnis. Materi informasi agribisnis yang diterima peternak juga menunjukkan kecenderungan serupa, yakni: sebagian besar (94,04%) peternak menyatakan menerima materi informasi tentang teknis produksi; 51,96% tentang manajemen agribisnis; dan hanya 29,68% tentang hubungan sistem agribisnis.

Berdasarkan indikator ciri, ternyata: (a) peternak belum mampu menerapkan teknologi untuk mengendalikan pengaruh alam yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan ayam, (b) belum mempunyai kebiasaan untuk membuat perencanaan secara tertulis, (c) hasil usaha belum digunakan untuk pemupukan modal, (d) belum sepenuhnya mampu menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi karena biaya teknologi masih dianggap terlalu mahal, dan (e) belum melakukan hubungan koordinasi vertikal secara baik dan benar (Nyoman Suparta, 2002).

Sikap dan perilaku seperti itulah yang menjadi penghalang besar untuk keberhasilan pengembangan agribisnis. Sayangnya sikap dan perilaku seperti itu tidak hanya terjadi pada peternak tetapi juga pada pelaku agribisnis lainnya, padahal untuk kemajuan suatu agribisnis diperlukan sikap dan perilaku yang seimbang antara perusahaan peternakan dengan perusahaan agribisnis lainnya. Karena itu, diperlukan penyuluhan sistem agribisnis.

Tabel 1. Perilaku Agribisnis pada Peternak Ayam Ras Pedaging (dalam Persen)

Jenis Peubah	Kategori	Kisaran Nilai	Klasifikasi responden					Uji χ^2 Lokasi	Uji χ^2 Pola Usaha
			Lokasi		Pola Usaha				
			Bali	Jatim	K	NK	K+NK		
Perilaku Agribisnis (total)	Rendah Sedang Tinggi	0,00-1,33 >1,33-2,67 >2,67-4,00	- 22,13 77,87	- 28,26 71,74	- 4,17 95,83	- 46,58 53,42	- 25,11 74,89	0,124	0,000**
Aspek Perilaku Teknis Produksi	Rendah Sedang Tinggi	0,00-1,33 >1,33-2,67 >2,67-4,00	0,82 24,59 74,59	0,87 31,74 67,39	0,42 16,25 83,33	1,28 40,17 58,55	0,84 28,06 71,10	0,221	0,000**
Aspek Perilaku Manajemen Agribisnis	Rendah Sedang Tinggi	0,00-1,33 >1,33-2,67 >2,67-4,00	- 54,01 45,99	- 47,53 52,47	- 44,77 55,23	- 57,47 42,53	- 50,87 49,13	0,165	0,007**
Aspek Perilaku Hubungan Sistem Agribisnis	Rendah Sedang Tinggi	0,00-1,33 >1,33-2,67 >2,67-4,00	31,97 62,70 5,33	37,83 57,83 4,35	1,67 88,75 9,58	68,80 31,20 -	34,81 60,34 4,85	0,393	0,000**
N			244	230	240	234	474		

Keterangan: K = Kemitraan, NK = Non kemitraan

PERILAKU AGRIBISNIS BERKEBUDAYAAN INDUSTRI

Keberhasilan usaha pertanian atau peternakan tidak bisa ditentukan oleh petani saja, tetapi merupakan hasil sinergi antara petani (perusahaan usahatani) dengan perusahaan yang menghasilkan sarana produksi pertanian dan perusahaan yang akan mengolah atau memasarkan hasilnya serta komponen penunjang agribisnis. Karena itu, harus ada kesamaan sikap dan perilaku serta etika bisnis diantara pengusaha para pelaku sistem agribisnis.

Pembangunan agribisnis dapat dilakukan melalui pemberdayaan petani dan pelaku sistem agribisnis lainnya tentang hakekat sistem agribisnis, yakni membangun sikap mental dan budaya industri pada masyarakat pertanian secara keseluruhan. Perusahaan pengadaan dan penyediaan sarana produksi, perusahaan pengolahan dan perusahaan pemasaran, tidaklah serta merta menjadi Pembina dalam hubungan kemitraan inti plasma. Perusahaan tersebut, sebelum membina harus dibina terlebih dahulu oleh subsistem jasa penunjang agribisnis.

Suatu kesalahan yang sangat konyol selama ini adalah: (a) tindakan penyuluh yang selalu berfokus kepada upaya untuk memperbaiki kemampuan teknis produksi petani, padahal yang terpenting adalah meningkatkan kemampuan manajemen agribisnis dan manajemen

hubungan sistem agribisnisnya; (2) para penyuluh kita telah terjebak di dalam lingkaran sistem kerja yang keliru, memandang peningkatan produksi sebagai tujuan akhir; (3) disadari atau tidak para pejabat pertanian kita telah membentuk opini masyarakat bahwa tingkat produksi dan produktivitas merupakan ukuran keberhasilan pembangunan pertanian; dan (4) para pejabat pertanian memandang bahwa perusahaan agribisnis yang berada di hulu dan di hilir sebagai pengusaha yang sudah professional dan memahami sistem agribisnis, padahal mereka belum tentu mampu memahami maupun melakukan konsep sistem agribisnis secara baik. Jika para pejabat pertanian atau penyuluh masih mempunyai cara pandang seperti itu, bagaimana jadinya dengan petani kita kedepan?

Kesalahan cara pandang seperti itu menyebabkan para pejabat pemerintahan kita selalu sibuk mengurus petani atau peternak, melakukan penyuluhan yang tidak tepat sasaran kepada petani, dan memberikan fasilitas yang juga keliru kepada petani. Hal inilah yang dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusan pada para pejabat pemerintahan maupun petani peternak kita. Petani hanyalah merupakan salah satu komponen perusahaan agribisnis. Jika keberhasilan agribisnis tidak bisa dilakukan oleh petani saja, maka komponen perusahaan agribisnis lainnya haruslah menjadi fokus perhatian yang tidak kalah pentingnya dengan petani peternak itu sendiri. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah di bidang pembangunan pertanian haruslah bersifat holistik, yakni menyentuh semua komponen pelaku sistem agribisnis dan mengkoordinasikannya untuk memberdayakan agribisnis. Kebijakan dan tindakan seperti itu harus dilakukan secara terus menerus hingga menjadi budaya bagi masyarakat agribisnis di Indonesia.

Apabila semua komponen pelaku sistem agribisnis sudah dapat memahami hakekat sistem agribisnis dan menjadikannya sebagai budaya dalam mengelola perusahaan agribisnis maka otomatis pendapatan dan kesejahteraan petanipun akan meningkat. Menurut Soekanto (1990) kebudayaan diartikan sebagai garis-garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Pertanian “berbudaya industri” adalah pengelolaan kegiatan pertanian secara industri, yakni membuat kebudayaan industri menjadi kebudayaan milik pertanian, yang secara fundamental berarti membangun sikap mental dan budaya masyarakat pertanian sebagaimana sikap mental dan budaya yang hidup dalam masyarakat industri (Solahuddin, 1999). Kondisi yang berlawanan dengan budaya industri adalah “budaya agraris” yang dicirikan oleh sifat komunal, diikat oleh kesadaran kolektif, terdapat ikatan emosional, hubungan dan orientasi primordial, keterkaitan dengan alam tinggi, dan teknologi masih sederhana.

Ciri perilaku agribisnis berkebudayaan industri yang diharapkan terbentuk adalah: (1) tekun, ulet, kerja keras, hemat, cermat, disiplin dan menghargai waktu; (2) mampu

merencanakan dan mengelola usaha; (3) selalu memegang teguh asas efisiensi dan produktivitas, (4) menggunakan teknologi terutama teknologi tepat guna dan akrab lingkungan, (5) mempunyai motivasi yang kuat untuk berhasil, (6) berorientasi kepada kualitas produk dan permintaan pasar, (7) berorientasi kepada nilai tambah, (8) mampu mengendalikan dan memanfaatkan alam, (9) tanggap terhadap inovasi, (10) berani menghadapi risiko usaha, (11) melakukan agribisnis yang terintegrasi maupun quasi integrasi secara vertikal, (12) perekayasaan harus menggantikan ketergantungan pada alam sehingga produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang diminta pasar, dan (13) professional serta mandiri dalam menentukan keputusan.

Apabila ciri yang menjadi prinsip industri itu sudah dipahami, dihayati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh komunitas para pelaku sistem agribisnis, maka perilaku agribisnis dikatakan sudah menjadi “budaya industri”. Menurut Council on Food, Agricultural and Resource Economics (Simatupang, 1995) industri dalam agribisnis dapat pula dipahami sebagai struktur agribisnis industrial, yakni konsolidasi usahatani yang disertai dengan koordinasi vertikal diantara seluruh tahapan agribisnis dalam satu alur produk melalui mekanisme non pasar sehingga karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan pilihan konsumen akhir.

Suparta (2001) menandakan bahwa, perilaku agribisnis peternak ayam ras pedaging belum kondusif ke arah perilaku agribisnis berkebudayaan industri, karena: (a) kurang didukung oleh aspek perilaku hubungan sistem agribisnis, (b) terlalu berorientasi kepada *on farm agribusiness*, pola pikir dan etika kesisteman untuk mencapai tujuan bersama masih kurang, sehingga peternak belum mampu merumuskan visi, misi, etika bisnis, tujuan, sasaran dan rencana kerja baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan perusahaan agribisnis lainnya yang seharusnya dapat didiskusikan dan dirumuskan secara terbuka oleh para pihak. Kondisi yang hampir serupa juga tampak pada pelaku sistem agribisnis lainnya. Jika perilaku agribisnis pada peternak ayam ras pedaging yang nota bena karakteristik usahanya sudah bersifat industri serta dikenal pula dengan sebutan “industri peternakan rakyat” belum juga kondusif ke arah perilaku agribisnis berkebudayaan industri, bagaimana halnya dengan pelaku agribisnis pada komoditas pertanian lainnya?

Untuk meningkatkan perilaku agribisnis itu, dapat direkomendasikan penyuluhan dengan pendekatan “penyuluhan sistem agribisnis”, yang: (a) tujuan penyuluhannya jelas ke arah peningkatan perilaku agribisnis, (b) metode dan media komunikasi harus lebih beragam dan jelas polanya untuk memenuhi kebutuhan sasaran, (c) materi penyuluhannya lengkap mencakup aspek teknis produksi, aspek manajemen agribisnis, dan aspek hubungan sistem agribisnis dengan wawasan industri.

Penyuluhan sistem agribisnis tidak hanya ditujukan kepada petani atau peternak, tetapi hendaknya ditujukan pula kepada pelaku sistem agribisnis lainnya, agar masing-masing perusahaan agribisnis mampu memahami dengan baik dan benar hakekat sistem agribisnis, selanjutnya sangat diharapkan akan mampu membangun kesamaan sikap, perilaku dan etika bisnis dalam kebersamaan dan saling ketergantungan.

PENYULUHAN SISTEM AGRIBISNIS

Menurut Suparta (2001), yang dimaksud dengan penyuluhan sistem agribisnis adalah “jasa layanan dan informasi agribisnis yang dilakukan melalui proses pendidikan non formal untuk petani dan pihak-pihak terkait yang memerlukan, agar kemampuannya dapat berkembang secara dinamis untuk menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang dihadapinya dengan baik menguntungkan dan memuaskan.” Kegiatan penyuluhan itu adalah jasa layanan, dan jasa layanan itulah yang harus dibuat bermutu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan sasaran penyuluhan pada waktu yang diperlukan. Mutu jasa layanan dapat dilihat dari segi keterpercayaan (*reliability*), keterjaminan (*assurance*), penampilan (*tangibility*), kepedulian (*empathy*), dan ketanggapan (*responsiveness*). Jasa layanan itu dilakukan melalui proses pendidikan non formal guna meningkatkan kesadaran para pelaku sistem agribisnis (sasaran), yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media cetak atau elektronik. Dengan demikian, sasaran penyuluhan diharapkan akan meningkat kemampuannya secara dinamis untuk dapat menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang dihadapinya. Sasaran penyuluhan atau para pelaku sistem agribisnis juga diharapkan kreatif, inovatif, berani dan bebas mengambil keputusan untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapinya dengan kekuatan dan kemampuan yang ada pada dirinya serta prospek pengembangan usahanya ke depan.

Materi penyuluhan tidak hanya mengenai teknis produksi saja, tetapi mencakup seluruh aspek teknis produksi, aspek manajemen agribisnis dan aspek hubungan sistem agribisnis dengan wawasan industri terutama etika kesisteman, kemampuan kewirausahaan, dan keperibadian sebagai pengusaha agribisnis agar pelaku sistem agribisnis dapat memiliki persepsi dan sikap yang sama tentang: visi, misi, etika bisnis, tujuan, sasaran dan rencana kerja bersama yang dirumuskan dengan cara terbuka. Tujuan penyuluhan sistem agribisnis harus jelas kearah terbentuknya perilaku agribisnis dengan wawasan industri. Metode penyuluhannya maupun media komunikasi yang digunakan agar lebih beragam, inovatif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan target sasaran.

Uraian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas menggambarkan tentang konsep penyuluhan sistem agribisnis, yang berbeda dengan penyuluhan sistem Bimas. Konsep

penyuluhan sistem Bimas mengutamakan materi penyuluhan tentang Sapta Usaha Pertanian/Peternakan yang dilengkapi dengan penyediaan sarana kredit dan paket sapronak, tetapi tidak menekankan pentingnya manajemen hubungan sistem agribisnis. Penyuluhan sistem agribisnis sangat menekankan pentingnya manajemen hubungan sistem agribisnis atau koordinasi vertikal diantara para pelaku sistem agribisnis.

Penyuluhan sistem agribisnis menekankan perlunya penyamaan persepsi dan sikap tentang visi, misi, etika bisnis, tujuan, sasaran dan rencana kerja bersama diantara para pelaku sistem agribisnis. Karena itu, kegiatan penyuluhan sistem agribisnis tidaklah adil jika hanya dilakukan kepada petani peternak saja. Petani memang memerlukan penyuluhan, tetapi para pelaku perusahaan agribisnis lainnya dan subsistem jasa penunjang yang terkait dalam sistem agribisnis juga perlu dilakukan penyuluhan. Jika hal ini berhasil, maka akan terbentuk hubungan yang harmonis dalam kebersamaan dan saling ketergantungan diantara para pelaku system agribisnis untuk menghasilkan visi, misi, etika bisnis, tujuan dan sasaran serta rencana kerja bersama agar dapat menghasilkan produk pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Penyuluhan sistem agribisnis juga memerlukan perubahan perilaku penyuluh, yakni harus mampu: (a) meningkatkan profesionalisme penyuluh dengan melakukan perbaikan mutu layanan secara terus menerus yang mengacu kepada kebutuhan dan kepuasan pelanggannya; (b) menguasai materi penyuluhan yang menyangkut teknis produksi, manajemen agribisnis, manajemen hubungan sistem agribisnis, informasi permintaan pasar atau kebutuhan konsumen, jiwa kewirausahaan, serta etika bisnis dan keunggulan bersaing; (c) tidak menjadikan petani dan perusahaan agribisnis lainnya sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang dapat menentukan masa depannya sendiri; dan (d) melakukan fungsi melayani (konsultatif) dengan sistem “menu”.

Untuk mendukung strategi pendekatan “penyuluhan sistem agribisnis” maka, penyuluh seharusnya tetap berpegang pada falsafah dasar penyuluhan pertanian (Slamet, 1969 dan Samsudin, 1987), yaitu: (1) penyuluhan merupakan proses pendidikan, (2) penyuluhan merupakan proses demokrasi, dan (3) penyuluhan merupakan proses kontinyu. Penyuluh juga sebaiknya tetap berpegang pada prinsip-prinsip penyuluhan (Dahama dan Bhatnagar, 1980), antara lain: (1) penyuluhan akan efektif bila mengacu kepada minat dan kebutuhan sasaran, (2) penyuluhan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan program penyuluhan, (3) penyuluh mendorong terjadinya belajar sambil bekerja, (4) penyuluh harus orang yang sudah terlatih dan benar-benar menguasai materi yang akan disuluhkan, (5) metode penyuluhan disesuaikan dengan kondisi

spesifik sasaran (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan sosial budaya), dan (6) penyuluhan harus mampu mengembangkan kepemimpinan partisipatif.

Peran penyuluh adalah mengembangkan kondusifitas lingkungan belajar bagi sasaran penyuluhan untuk belajar secara mandiri, dan memberikan konsultasi bagi petani peternak atau pengusaha agribisnis lain yang memerlukan. Penyuluh berkewajiban menyadarkan sasaran penyuluhan tentang adanya kebutuhan yang nyata (*real need atau unfelt need*) menjadi kebutuhan yang dirasakan (*felt need*). Penyuluh harus mampu mengajak sasaran penyuluhan berpikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersama-sama sehingga terjadi pemecahan masalah dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka.

Penyuluh akan semakin mampu menerapkan “pendekatan penyuluhan sistem agribisnis” yang makin efektif apabila mampu menghayati secara sungguh-sungguh materi penyuluhan sistem agribisnis, dan makin berkemampuan tinggi dalam menerapkan keanekaragaman metode penyuluhan dan media komunikasi kepada sasarnya secara tepat dan bijak.

Untuk keberhasilan penyuluhan sistem agribisnis di masa depan, maka penyuluhan sistem agribisnis agar dilakukan oleh “penyuluh profesional,” yang dapat berasal dari penyuluh dinas ataupun penyuluh swasta, yang mempunyai kompetensi dan komitmen diri yang tinggi untuk menjaga profesionalisme penyuluh. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1999), profesional diartikan sebagai memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya serta mengharuskan adanya pembayaran atas jasa profesi. Profesionalisme penyuluh disamping mencerminkan keahliannya, juga harus mampu menunjukkan mutu layanannya, kemandirin dan kewirausahaan.

Menurut Anoraga (1998), seorang profesional harus mampu memadukan unsur kemampuan teknis (kompetensi) dan kematangan etik, moral dan akal. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi profesional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, beberapa ciri profesionalisme, yaitu: (1) mengejar kesempurnaan hasil, (2) memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan, (3) sifat keteguhan dan ketabahan untuk mencapai hasil hingga tercapai, (4) mempunyai integritas tinggi, (5) memerlukan kebulatan pikiran dan perbuatan untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi.

Menurut Slamet *et al.* (1996), profesionalisasi penyuluhan dapat dilakukan dengan mengacu kepada penerapan manajemen mutu terpadu, yakni pola manajemen penyuluhan yang memuat prosedur agar setiap orang dalam organisasi penyuluhan terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses, dan dengan penuh semangat berpartisipasi dalam

perbaikan pelaksanaan kerja. Penyuluhan dikatakan bermutu baik jika dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pihak yang disuluh (sasaran). Agar penyuluhan dapat bermutu baik maka seluruh sumber daya harus dapat dipergunakan dengan baik, dan proses penyuluhan harus tetap berpegang pada falsafah dan prinsip penyuluhan.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka ciri-ciri penyuluh professional adalah sebagai berikut: (a) mempunyai latar belakang keahlian dibidang agribisnis, (b) memahami betul posisi dan peranan dirinya sebagai penyuluh agribisnis, (c) menguasai betul semua aspek agribisnis, seperti: teknis produksi, manajemen agribisnis, hubungan sistem agribisnis, dan etika bisnis (keadilan, kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan), (d) selalu mengejar kesempurnaan hasil melalui penerapan manajemen mutu terpadu dalam penyelenggaraan penyuluhan, (e) biasa belajar dan bekerja dengan penuh kesungguhan hati dan ketelitian, (f) mempunyai sifat teguh dan tabah serta tekad yang kuat untuk mencapai hasil, (g) mampu mengatasi kesulitan permodalan usaha petani peternak melalui perusahaan inti atau lembaga keuangan lainnya, (h) mampu meyakinkan petani bahwa materi penyuluhan yang disampaikan akan membawa perbaikan bagi peningkatan produksi dan produktivitas usahatani, (i) mampu melindungi petani peternak dari kemungkinan kerugian total dengan cara mengupayakan biaya kompensasi pemeliharaan minimal dari perusahaan intinya/mitranya, dan (y) simpatik, jujur, tekun, dan disiplin dalam bekerja, dinamis dan progresif dalam menyesuaikan diri dengan peternak.

Informasi yang dikemukakan menunjukkan bahwa strategi pendekatan “penyuluhan sistem agribisnis” memerlukan beberapa prakondisi, yakni: syarat keharusan (*necessary condition*) dan syarat kecukupan (*sufficient condition*). Syarat keharusan, merupakan kondisi minimum yang harus ada agar penyuluhan sistem agribisnis dapat berjalan dengan baik, yaitu: (1) penyuluh profesional agar memiliki kompetensi keahlian dan etika profesionalisme; (2) penyuluh agar tetap berpegang pada falsafah penyuluhan dan prinsip-prinsip penyuluhan; (3) visi dan misi penyuluhan agar menempatkan petani peternak dan usahatani sebagai sentral dalam penyelenggaraan penyuluhan; (4) tujuan penyuluhan agar jelas dan dapat dipahami bersama petani peternak yakni meningkatkan perilaku agribisnis yang berbudaya industri; (5) memanfaatkan sumber daya penyuluhan semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan penyuluhan untuk mencapai tujuan; (6) sasaran perubahan perilaku harus jelas dan terukur yakni mampu memahami dan melakukan hubungan sistem agribisnis dan etika kesisteman yang baik; (7) materi penyuluhan menyangkut semua aspek sistem agribisnis, yakni: aspek teknis produksi, manajemen agribisnis, hubungan sistem agribisnis berwawasan industri, etika kesisteman, kewirausahaan; (8) metode dan media komunikasi penyuluhan harus lebih beragam agar mampu meningkatkan perubahan aspek psikologis yang lebih dekat kepada

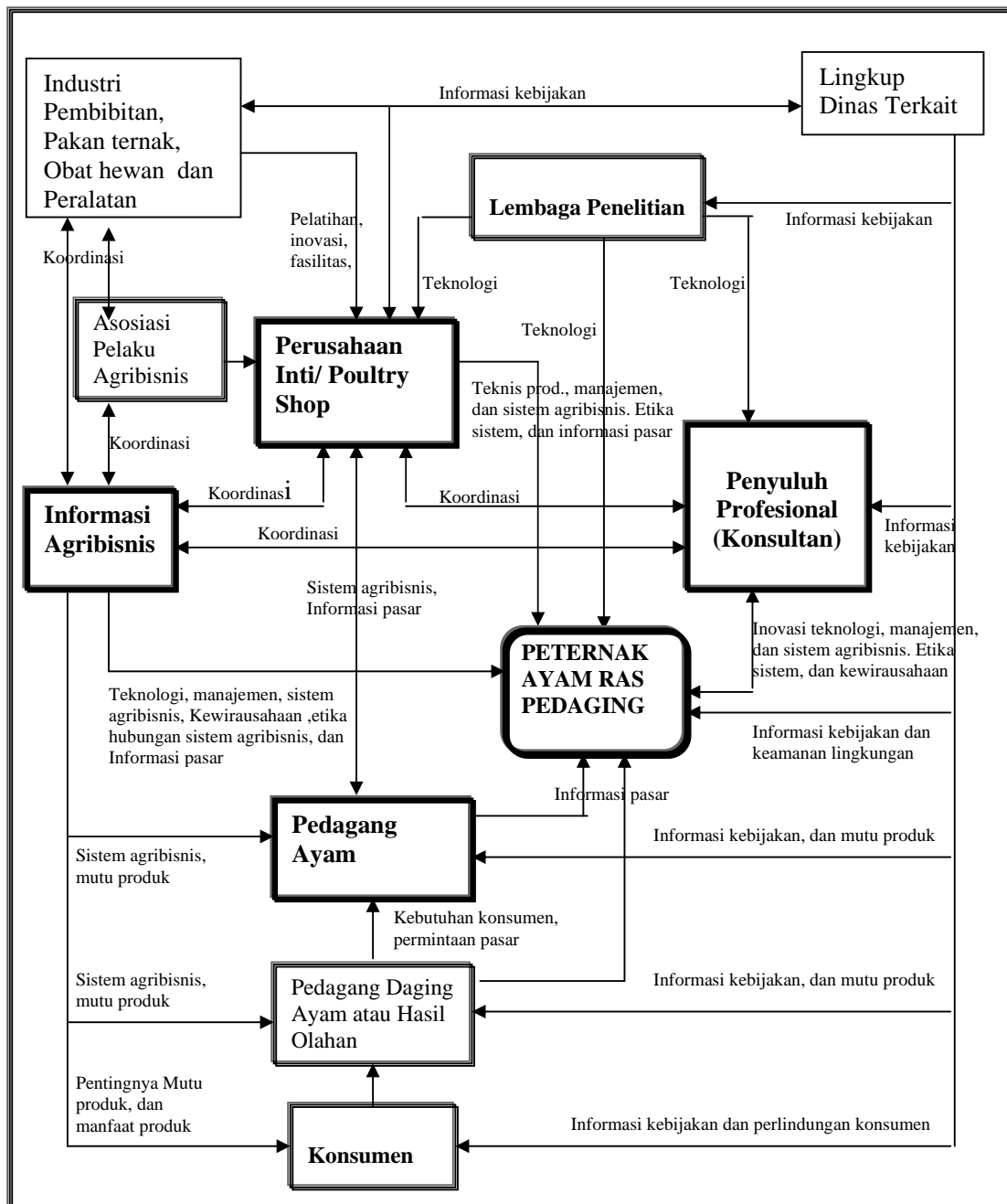
perubahan perilaku, yakni: persepsi, sikap, keterampilan dan sifat kewirausahaan petani peternak; dan (9) fasilitas dan pendapatan yang memadai bagi penyuluh.

Syarat kecukupan merupakan lingkungan yang memperlancar mekanisme kerja “penyuluhan Sistem Agribisnis”, yakni: (1) kebijakan pemerintah tentang pembangunan pertanian melalui pendekatan agribisnis, serta kebijakan pemerintah tentang fungsi dan peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian, (2) situasi perekonomian makro yang stabil dan dinamis dan memberikan iklim yang baik bagi berkembangnya usaha pertanian, (3) situasi sosial politik yang stabil sehingga tidak mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara makro, (4) kondisi infra struktur yang memadai sehingga memudahkan dan memperlancar pelaksanaan proses produksi dan proses pemasaran hasil, (5) dukungan fungsi-fungsi lain, seperti: lembaga penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pasar yang kuat untuk menjual hasil produksi dan hasil olahannya, pelayanan informasi agribisnis, lembaga keuangan dan asuransi. Agar fungsi-fungsi itu dapat bersinergi dengan baik maka fungsi-fungsi itu agar memiliki persepsi dan sikap yang sama tentang sistem agribisnis.

MODEL PENYULUHAN AGRIBISNIS AYAM RAS PEDAGING

Model penyuluhan sistem agribisnis disusun atas dasar fungsi dan peran masing-masing komponen sistem yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penyuluhan sistem agribisnis (Gambar 2). Hubungan antar subsistem tersebut tidak ada kedudukan yang ter subordinasi, hubungan antar subsistem merupakan hubungan kolegial, hubungan fungsional, koordinasi vertikal yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Peran dari masing-masing fungsi subsistem terlihat dalam keterangan yang menyertai setiap garis yang menunjukkan hubungan antar subsistem.

:



Gambar 1. Model Penyuluhan Sistem Agribisnis Ayam Ras Pedaging

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Rendahnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak selama ini, karena terlalu berorientasi kepada produksi dan produktivitas, kurang berorientasi kepada kebutuhan pasar dan hubungan sistem agribisnis, sehingga perolehan nilai tambah rendah. Sinergi antara perusahaan usahatani dengan perusahaan agribisnis lainnya kurang solid. Akibatnya, permintaan produk pertanian menjadi tidak jelas dan harganya cenderung kurang menguntungkan petani.

Rendahnya perilaku agribisnis tidak hanya terjadi pada petani tetapi juga terjadi pada pelaku perusahaan agribisnis lainnya. Karena itu, wajib bagi masyarakat agribisnis untuk menyadarinya, selanjutnya sesegera mungkin harus dapat memperbaikinya. Kegiatan penyuluhan juga ditujukan kepada para pelaku perusahaan agribisnis lainnya serta lembaga tertentu yang berada di subsistem jasa penunjang. Kebersamaan dan saling ketergantungan diantara semua perusahaan agribisnis akan menghasilkan visi, misi, etika bisnis, tujuan dan sasaran serta rencana kerja bersama yang harmonis untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Untuk meningkatkan perilaku agribisnis itu diperlukan pendekatan penyuluhan sistem agribisnis, yang materi penyuluhannya mencakup keseluruhan aspek teknis produksi, aspek manajemen agribisnis dan aspek manajemen hubungan sistem agribisnis dengan wawasan industri, terutama etika kesisteman, kemampuan kewirausahaan, dan keperibadian sebagai pengusaha agribisnis agar para pelaku sistem agribisnis dapat memiliki persepsi dan sikap yang sama tentang: visi, misi, etika bisnis, tujuan, sasaran dan rencana kerja bersama yang dirumuskan dengan cara terbuka. Tujuan penyuluhan sistem agribisnis harus jelas kearah terbentuknya perilaku agribisnis yang berkebudayaan industri. Metode penyuluhannya maupun media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan agar lebih beragam, inovatif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan.

Penyuluhan sistem agribisnis juga memerlukan perubahan perilaku penyuluh, menjadi penyuluh sistem agribisnis yang professional. Penyuluh akan semakin efektif apabila secara sungguh-sungguh mampu menghayati materi penyuluhan sistem agribisnis, dan makin berkemampuan tinggi dalam menerapkan keanekaragaman metode penyuluhan dan media komunikasi kepada sasaran penyuluhan secara tepat dan bijak. Strategi pendekatan “penyuluhan sistem agribisnis” juga memerlukan beberapa prakondisi, yakni: syarat keharusan (*necessary condition*) dan syarat kecukupan (*sufficient condition*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. 1995. "Sembilan Puluh Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia (1905-1995)" Di dalam: *Dinamika dan Persektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Pertanian Jangka Panjang Tahap Kedua*. Prosiding Lokakarya; Bogor, 4-5 Juli 1995. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. hlm 39-134.
- Amirin, T.M. 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Ed. Ke-1, Cet. Ke-6. Rajawali Pers. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anoraga, P. 1998. *Psikologi Kerja*. Cet Ke-2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dahama, O.P., dan O.P. Bhatnagar. 1980. *Education and Communication for Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing CO.
- Departemen Pertanian. 2001. *Pembangunan Sistem agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional*. Edisi Pertama. Jakarta.
- Downey, W.D., dan S.P. Erickson. 1992. *Manajemen Agribisnis*. Ed. Ke-2, Cet. Ke-3. R. Ganda.S. dan A. Sirait, Penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: *Agribusiness Management*.
- Jarmie, M.Y. 1994. "Sistem Penyuluhan Pembangunan Pertanian Indonesia." [Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Kast, F.E., dan J.E. Rosenzweig. 1995. *Organisasi dan Manajemen*. Jilid 1, Ed. Ke-4, Cet. Ke-4. A. Hasyani Ali Penerjemah. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Terjemahan dari:
- Mosher, A.T. 1966. *Getting Agriculture Moving*. New York: Fredrick A. Praeger. Inc.Publishers.
- Rogers, E.M. 1969. *Modernization Among Peasant: The Impact Of Communication*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc.
- Samsudin, U.,1987. *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Cet. Ke-3. Bandung: Binacipta.
- Slamet, M., dan P.S. Asngari. 1969. *Penyuluhan Peternakan*. Jakarta: Dirjen Peternakan.
- _____, D.P. Tampubolon, M. J. Hanafiah, dan A. Hamim. 1996. *Manajemen Mutu Terpadu di Perguruan Tinggi*. Jakarta: HEDS Project.
- Simatupang, P., 1995. *Industrialisasi Pertanian Sebagai strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi*. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Soekanto, S. 1990. *sosiologi suatu Pengantar*. Edisi Baru Ke empat. Cetakan Keduabelas. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Solahuddin, S. 1999. *Visi Pembangunan Pertanian Abad 21*. Cet. Ke-1. Diedit oleh: Arief Satria dan Amirudin Saleh. ISBN: 979-493-066-0/tahun 1999. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suparta, N. 2001. *Perilaku Agribisnis dan Kebutuhan Penyuluhan Peternak Ayam Ras Pedaging*. [Disertasi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.